



2024

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

KPKNL BIAK



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 6 Mei 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Fauzi
NIP 19771106 200001 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 6 Mei 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Fauzi
NIP 19771106 200001 1 001



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan IV TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.537.731.481 atau mencapai 111% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp 1.384.020.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 1.673.851.247 atau mencapai 91% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.830.025.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per Triwulan IV 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.425.278.833 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1.501.000 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.423.777.833

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 5.182.432 dan Rp 5.420.096.401.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.537.731.481 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 1.941.472.577 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 403.741.096.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 403.741.096.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 5.672.098.981 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 403.741.096 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 151.738.516, sehingga terdapat penurunan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp 252.002.580.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BIAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Angg	2023		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.384.020.000	1.537.731.481	111	686.245.000	1.713.498.551	250
JUMLAH PENDAPATAN		1.384.020.000	1.537.731.481	111	686.245.000	1.713.498.551	250
BELANJA							
Belanja Operasi	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-	-	
Belanja Barang	B.4	1.799.126.000	1.643.018.947	91	1.785.540.000	1.590.924.884	89
Belanja Modal	B.5	30.899.000	30.832.300	100	20.750.000	20.250.840	98
Jumlah Belanja Operasi		1.830.025.000	1.673.851.247	91	1.806.290.000	1.611.175.724	89
JUMLAH BELANJA		1.830.025.000	1.673.851.247	91	1.806.290.000	1.611.175.724	89

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK NERACA

PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.501.000	739.357.000
Piutang PNB		
Bagian Lancar TP/TGR		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		
Belanja Dibayar di Muka		
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
Persediaan	-	26.825.925
Jumlah Aset Lancar	1.501.000	766.182.925
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan TP/TGR	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	2.613.536.000	2.613.536.000
Peralatan dan Mesin	3.049.043.596	3.265.292.010
Gedung dan Bangunan	3.176.179.760	3.176.179.760
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.414.981.523)	(3.406.741.282)
Jumlah Aset Tetap	5.423.777.833	5.648.266.488
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	264.930.714	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(264.930.714)	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	5.425.278.833,00	6.414.449.413,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN		
Utang kepada Pihak Ketiga	5.182.432	742.350.432
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.182.432	742.350.432
JUMLAH KEWAJIBAN	5.182.432	742.350.432
EKUITAS		
Ekuitas	5.420.096.401	5.672.098.981
JUMLAH EKUITAS	5.420.096.401	5.672.098.981
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.425.278.833	6.414.449.413

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BIAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.537.731.481	1.713.498.551
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.537.731.481	1.713.498.551
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	136.901.825	101.456.355
Beban Barang dan Jasa	D.4	845.205.464	804.621.666
Beban Pemeliharaan	D.5	180.265.792	216.514.478
Beban Perjalanan Dinas	D.6	508.159.791	468.413.210
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	270.939.705	333.505.386
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		1.941.472.577	1.924.511.095
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(403.741.096)	(211.012.544)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(403.741.096)	(211.012.544)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(403.741.096)	(211.012.544)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BIAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Triwulan IV TA 2024	Triwulan IV TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.672.098.981	5.942.633.162
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(403.741.096)	(211.012.544)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	151.738.516	(59.521.637)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(252.002.580)	(270.534.181)
EKUITAS AKHIR	E.7	5.420.096.401	5.672.098.981

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuanga Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

Profil

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Majapahit No.2, Biak Numfor, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang,

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.1/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku memiliki unit pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata

setiap Semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - d. Tanah
 - e. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Biak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

Uraian	2024	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704.174.000	704.174.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	18.685.000	18.685.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	661.161.000	661.161.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain		-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		-
Jumlah Pendapatan	1.384.020.000	1.384.020.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.799.126.000	1.799.126.000
Belanja Modal	30.899.000	30.899.000

Realisasi
Pendapatan
Rp1.537.7
31.481

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.537.731.481 atau mencapai 111 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.384.020.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704.174.000	928.308.195	131
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.685.000	46.356.108	248
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	661.161.000	562.216.178	85
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin		-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	851.000	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Jumlah	1.384.020.000	1.537.731.481	111

Pada Triwulan IV TA 2024 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I sebesar Rp928.308.195. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pegadaian sebesar Rp562.216.178, dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp46.356.108. Pendapatan anggaran lain-lain berasal dari penyetoran dana mengendap.

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp1.673.8
51.247*

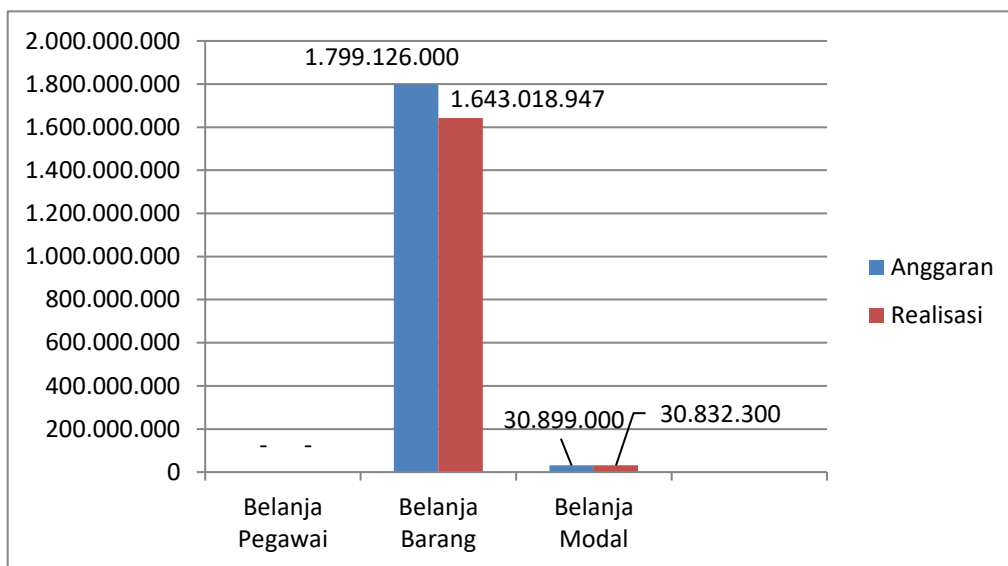
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Triwulan IV TA 2024 adalah sebesar Rp1.673.851.247 atau 91 persen dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp1.830.025.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Triwulan IV TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.799.126.000	1.643.018.947	91
Belanja Modal	30.899.000	30.832.300	99
Total Belanja Kotor	1.830.025.000	1.673.851.247	91
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	1.830.025.000	1.673.851.247	91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2024 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.643.018.947 atau 91,32% dari pagu anggaran sebesar Rp1.799.126.000 dan Belanja Modal sebesar Rp30.832.300 atau 99,78% dari pagu anggaran sebesar Rp30.899.000. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena telah pulihnya situasi setelah pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan oleh seksi teknis dan operasional kantor dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama. Perbandingan realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.643.018.947	1.590.924.884	3,27
Belanja Modal	30.832.300	20.250.840	52,25
Jumlah	1.673.851.247	1.611.175.724	3,89

*Belanja
Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai TA 2024 sama dengan TA 2023, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

*Belanja
Barang
Rp1,643,0
18,947*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.643.018.947 dan Rp 1.590.924.884. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 3,27% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2024 sudah lebih kondusif apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp30.832.
300

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 30.832.300 dan Rp 20.250.840. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 52,25% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI Triwulan III TA 2024	REALISASI Triwulan III TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.832.300	20.250.840	52
Jumlah Belanja Kotor	30.832.300	20.250.840	52
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	30.832.300	20.250.840	52

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Triwulan III 2024	TA	Triwulan III 2023	TA
Uang Tunai	-	-	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ kan	-	-	-	-
Saldo Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab

Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.501.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.501.000 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp739.357.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	-
Biad PPN yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Dana Pihak Ketiga	1.501.000	739.357.000
Jumlah	1.501.000	739.357.000

*Piutang PNBPNP
Rp0*

C.4 Piutang PNBPNP

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki piutang PNBPNP. Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tabel 3.4 Rincian Piutang PNBPNP

Uraian	TA 2024	TA 2022
Piutang PNBPNP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Bagian Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang masih harus diterima Rp 0.

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp67.203.345

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp26.825.925. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	-	26.825.925
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	-	26.825.925

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp2.613.536.000

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Biak per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.613.536.000. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	930	Jl. Wandamen	731.096.000
2	730	Jl. Temini	551.473.000
3	1.219	Jl. Condro	1.330.967.000
Jumlah			2.613.536.000

Peralatan dan

Mesin

Rp3.049.043.596

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.049.043.596 dan Rp3.265.292.010. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.262.621.793
Mutasi tambah:	
Pembelian	51.352.517
Transfer Masuk	48.682.300
Mutasi kurang:	2.670.217
	264.930.714
Saldo per 31 Desember 2024	3.049.043.596
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.776.538.084)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	272.505.512

Gedung dan
Bangunan
Rp3.176.179.760

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp3.176.179.760 dan Rp3.176.179.760.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.176.179.760
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	3.176.179.760
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(638.443.439)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2.537.736.321

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi transaksi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

C.17 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0.*

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada TA 2024 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(3.414.981.523)*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp3.414.981.523 dan Rp3.406.741.281. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.613.536.000	-	2.564.512.000
Peralatan dan Mesin	3.049.043.596	(2.776.538.084)	272.505.512
Gedung dan Bangunan	3.176.179.760	(638.443.439)	2.537.736.321
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan	8.838.759.356	-3.414.981.523	5.423.777.833

*Aset Lain-Lain Rp.
264.930.714*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp264.930.714 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(264.930.714)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp Rp(264.930.714) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp5.182.432*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.182.432 dan Rp742.350.432. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0.*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum ditagihkan tersebut merupakan transaksi atas UP yang belum diajukan SPM GUP ke KPPN.

*Ekuitas
Rp5.420.096.401*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.420.096.401 dan Rp5.672.098.981 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.537.731.481

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.537.731.481. dan Rp1.713.498.551. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan Triwulan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.537.731.481	1.713.498.551	-10,26%
Jumlah	1.537.731.481	1.713.498.551	-10,26%

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, serta Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban
Persediaan
Rp136.901.825*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp136.901.825 dan Rp101.456.355. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	136.901.825	101.456.355	34,94%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	136.901.825	101.456.355	34,94%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp845.205.464*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp845.205.464 dan Rp804.621.666. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa di TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

*Beban
Pemeliharaan
Rp180.265.792*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp180.265.792 dan Rp216.514.478. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan di TA 2023 mengalami penurunan 16 persen karena adanya pemeliharaan pada kendaraan dinas roda 4.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp508.159.791.*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp508.159.791 dan Rp468.413.210. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya karena keadaan, situasi, dan kondisi pandemi sampai dengan pertengahan 2024 yang jauh lebih kondusif apabila dibandingkan pada tahun 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dapat berjalan.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp270.939.705*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp270.939.705 dan Rp333.505.386. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.672.098.981

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.672.098.981 dan Rp5.942.633.162.

Defisit LO
Rp(403.741.096)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Desisit LO untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp403.741.096 dan Rp211.012.544. Defisit LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas aset berupa persediaan yang disebabkan oleh perubahan harga perolehan persediaan. Penyesuaian Nilai Aset berupa persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 pada KPKNL Biak adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Serta koreksi karena adanya Reklasifikasi kode barang pada pencatatan di SIMAK-BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

Transaksi Antar Entitas
Rp151.738.516

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas adalah selisih antara saldo akun yang ditagihkan ke entitas lain (313111) dan saldo akun diterima dari entitas lain (313121) ditambah dengan transaksi masuk atau dikurangi dengan transaksi keluar. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp151.738.516 dan Rp(59.521.637).

Nama Akun	2024
Ditagihkan ke entitas lain	1.673.851.247
Diterima dari entitas lain	(1.537.731.481)
Transfer masuk	15.618.750
Transaksi Antar Entitas	151.738.516

Ekuitas Akhir
Rp5.420.096.401

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.420.096.401 dan Rp5.672.098.981.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pada 31 Desember 2024 Pejabat Pengelola Keuangan pada tahun di Lingkup KPKNL Biak adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ahmad Fauzi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ahmad Fauzi
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Budi Sadewo
Bendahara Pengeluaran	: Muhammad Khairul Umam

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
 SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG BIAK

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 10:11 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,537,731,481	1,713,498,551	(175,767,070)	(10.258)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,537,731,481	1,713,498,551	(175,767,070)	(10.258)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,537,731,481	1,713,498,551	(175,767,070)	(10.258)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	136,901,825	101,456,355	35,445,470	34.937
Beban Barang dan Jasa	845,205,464	804,621,666	40,583,798	5.044
Beban Pemeliharaan	180,265,792	216,514,478	(36,248,686)	(16.742)
Beban Perjalanan Dinas	508,159,791	468,413,210	39,746,581	8.485
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
 SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG BIAK

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 10:11 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	270,939,705	333,505,386	(62,565,681)	(18.76)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,941,472,577	1,924,511,095	16,961,482	0.881
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(403,741,096)	(211,012,544)	(192,728,552)	91.335
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(403,741,096)	(211,012,544)	(192,728,552)	91.335
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(403,741,096)	(211,012,544)	(192,728,552)	91.335

Keterangan :

null

null

null

Biak, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD FAUZI SE
NIP 197711062000011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 10:11 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,672,098,981	5,942,633,162	(270,534,181)	(4.55)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(403,741,096)	(211,012,544)	(192,728,552)	91.34
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	151,738,516	(59,521,637)	211,260,153	(354.93)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(252,002,580)	(270,534,181)	18,531,601	(6.85)
EKUITAS AKHIR	5,420,096,401	5,672,098,981	(252,002,580)	(4.44)

Keterangan :

null

null

null

Biak, 17 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD FAUZI SE

NIP 197711062000011001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK 525474

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 10:12 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,830,025,000	1,673,851,247	(156,173,753)	91	1,806,290,000	1,611,175,724	195,114,276	89
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

null
null
null

Biak, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD FAUZI SE
NIP 197711062000011001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 017
SATUAN KERJA : 525474
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
PAPUA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 17/02/25 10:14 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	538,809,000	541,921,000	528,005,557	0	528,005,557	97.43	13,915,443
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	135,000,000	162,000,000	149,808,550	0	149,808,550	92.47	12,191,450
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,360,000	15,360,000	11,084,000	0	11,084,000	72.16	4,276,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,144,000	76,392,000	76,392,000	0	76,392,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	779,313,000	795,673,000	765,290,107	0	765,290,107	96.18	30,382,893
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	21,008,000	19,210,000	13,709,000	0	13,709,000	71.36	5,501,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	30,000,000	28,529,550	0	28,529,550	95.1	1,470,450
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	9,000,000	6,853,140	0	6,853,140	76.15	2,146,860
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,008,000	58,210,000	49,091,690	0	49,091,690	84.34	9,118,310
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	137,848,000	114,108,000	101,195,900	0	101,195,900	88.68	12,912,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	137,848,000	114,108,000	101,195,900	0	101,195,900	88.68	12,912,100
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	31,752,000	31,752,000	30,135,667	0	30,135,667	94.91	1,616,333
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	31,752,000	31,752,000	30,135,667	0	30,135,667	94.91	1,616,333
5231	Belanja Pemeliharaan							
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	0	26,000,000	8,880,000	0	8,880,000	34.15	17,120,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274,706,000	217,086,000	180,265,792	0	180,265,792	83.04	36,820,208
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	274,706,000	243,086,000	189,145,792	0	189,145,792	77.81	53,940,208
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	479,243,000	473,313,000	440,478,377	0	440,478,377	93.06	32,834,623
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,256,000	82,984,000	67,681,414	0	67,681,414	81.56	15,302,586
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	554,499,000	556,297,000	508,159,791	0	508,159,791	91.35	48,137,209
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,799,126,000	1,799,126,000	1,643,018,947	0	1,643,018,947	91.32	156,107,053
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,899,000	30,899,000	30,832,300	0	30,832,300	99.78	66,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	30,899,000	30,899,000	30,832,300	0	30,832,300	99.78	66,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	30,899,000	30,899,000	30,832,300	0	30,832,300	99.78	66,700
	JUMLAH BELANJA	1,830,025,000	1,830,025,000	1,673,851,247	0	1,673,851,247	91.47	156,173,753

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 525474

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
PAPUA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 17/02/25 10:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704,174,000	928,308,195	0	928,308,195	131.83
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	661,161,000	562,216,178	0	562,216,178	85.03
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18,685,000	46,356,108	0	46,356,108	248.09
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,384,020,000	1,536,880,481	0	1,536,880,481	111.04
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	851,000	0	851,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	851,000	0	851,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,384,020,000	1,537,731,481	0	1,537,731,481	111.11
	JUMLAH PENDAPATAN	1,384,020,000	1,537,731,481	0	1,537,731,481	111.11

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 10:12 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,501,000	739,357,000	(737,856,000)	(99.80)
Persediaan	0	26,825,925	(26,825,925)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	1,501,000	766,182,925	(764,681,925)	(99.80)
ASET TETAP				
Tanah	2,613,536,000	2,613,536,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,049,043,596	3,265,292,010	(216,248,414)	(6.62)
Gedung dan Bangunan	3,176,179,760	3,176,179,760	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,414,981,523)	(3,406,741,282)	(8,240,241)	0.24
JUMLAH ASET TETAP	5,423,777,833	5,648,266,488	(224,488,655)	(3.97)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	264,930,714	0	264,930,714	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(264,930,714)	0	(264,930,714)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	5,425,278,833	6,414,449,413	(989,170,580)	(15.42)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,182,432	742,350,432	(737,168,000)	(99.30)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,182,432	742,350,432	(737,168,000)	(99.30)
JUMLAH KEWAJIBAN	5,182,432	742,350,432	(737,168,000)	(99.30)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,420,096,401	5,672,098,981	(252,002,580)	(4.44)
JUMLAH EKUITAS	5,420,096,401	5,672,098,981	(252,002,580)	(4.44)
JUMLAH EKUITAS	5,420,096,401	5,672,098,981	(252,002,580)	(4.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,425,278,833	6,414,449,413	(989,170,580)	(15.42)

Keterangan :

null
null
null

Biak, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD FAUZI SE
NIP 197711062000011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,501,000	0
0.0	131111	Tanah	2,613,536,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,049,043,596	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,176,179,760	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,776,538,084
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	638,443,439
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	264,930,714	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	264,930,714
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,681,432
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,501,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,673,851,247
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,537,731,481	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,618,750
0.0	391111	Ekuitas	0	5,672,098,981
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	928,308,195
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	562,216,178
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	46,356,108
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	851,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	528,005,557	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	149,808,550	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,772,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76,392,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,709,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	28,529,550	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	6,853,140	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	30,135,667	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,265,792	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	440,478,377	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	67,681,414	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184,309,537	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86,630,168	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	136,901,825	0
JUMLAH			12,584,395,128	12,584,395,128

Keterangan :

null

null

null

Biak, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

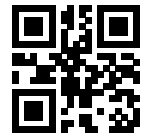
AHMAD FAUZI SE
NIP 197711062000011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,673,851,247
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,537,731,481	0
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	928,308,195
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	562,216,178
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	46,356,108
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	851,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	528,005,557	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	149,808,550	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,084,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	76,392,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	13,709,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	28,529,550	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	6,853,140	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	101,195,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	30,135,667	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,880,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,265,792	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440,478,377	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67,681,414	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,832,300	0
JUMLAH			3,211,582,728	3,211,582,728

Keterangan :

null

null

null

Biak, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranAHMAD FAUZI SE
197711062000011001